

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya mengenai Tingkat Partisipasi Warga dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterlibatan

Tingkat keterlibatan warga di Kelurahan Sukagalih dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) terdapat di tangga ke 7 Arnstein yaitu, *delegated power*. hal tersebut menunjukkan warga terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga proses pengambilan manfaat pada program PIPPK di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

2. Kebermaknaan

Dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Sukagalih, Kota Bandung menunjukkan bahwa kebermaknaan warga tergolong tinggi. Dimana, warga setempat merasa kehadirannya, ide dan gagasannya merasa dihargai serta memberikan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan, sehingga program PIPPK tersebut dapat

memberikan manfaat untuk warganya. Warga setempat bukan hanya sekedar terlibat saja, melainkan warga merasa bermakna berpartisipasi dalam program tersebut, dan pada akhirnya program yang dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan bersama dan bermanfaat untuk warga.

3. Tingkat Partisipasi

Tingkat partisipasi warga di Kelurahan Sukagalih terletak di tangga ke 7 tingkat partisipasi Arnstein yaitu (*delegated power*), dan tingkat partisipasi warga tergolong tinggi, dimana tendensi keterlibatan warga tinggi dan juga kebermaknaan tinggi dalam berpartisipasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan sudah terlaksana dengan baik yang didasarkan dengan partisipasi warga sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan warga memiliki hubungan yang baik dan saling berberan aktif sehingga program yang dilaksanakan juga dapat memberikan manfaat untuk warganya.

7.2 Saran

Partisipasi warga dalam PIPPK di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung sebaiknya tetap dipertahankan dan semakin ditingkatkan, sehingga ke depan kelurahan Sukagalih dapat menjadi contoh bagi kelurahan lainnya yang ada di Kota Bandung. Pemerintah dan warga terus bekerjasama dan ikut serta secara aktif dari setiap proses pembangunan yang dilaksanakan,

DAFTAR PUSTAKA

- Aduwina, P. (2017). Strategi Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Journal Public Policy*, 3, 209.
- Bayoa , G. (2013). Partisipasi Perempuan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program Keluarga dan Masyarakat Sejahtera. *Governance*, 5, 6.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2004). *Undang - Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* . Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.
- Eakman, A. (2011). Convergent Validity of The Engagement in Meaningful Activities Survey in a College Sample. *Journal of American OTJR: Occupation, Participation and Health*, 31, 3.
- Fadil, F. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 2, 55.
- Hariyanto, U. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Kebijakan Publik*, 1, 689.
- Kemenkumham. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan*. Jakarta: Ditjenpp Kemenkumham.

- Kementerian Luar Negeri. (2014). *Undang - Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri.
- Laksana, N. (2013). Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa Siaga di Kecamatan Playen. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1, 61.
- Muluk, K. (2007). *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah* (1 ed.). Malang: Bayumedia.
- Purwandari, A., & Mus , D. (2015). Studi Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 11, 380.
- Rosyida, I. (2011). Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (csr). *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, 5, 53.
- Said, U. (2018). Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 15, 162.
- Satria , W. (2011). Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. *Jurnal Keyberman*, 2, 115.

Silalahi, U. (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Silalahi, U. (2018). *Metodologi Analisis Data dan Interpretasi Hasil untuk Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT.Refika Aditama.

Valentine, S. (2018, Agustus 17). *Meaningful Participation From The Participants Perspective*. Diambil kembali dari stud.epsilon: https://stud.epsilon.slu.se/10614/7/valentine_s

Wali Kota Bandung. (2018). *Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Mengenai Peraturan Wali Kota No.281 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan PIPPK*. Bandung: Humas Kota Bandung.

Yudan , H. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Program-Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3, 102-103.